

EVALUASI RENJA TRIWULAN I 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, April 2021

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Program, Kegiatan, indikator dan Kelompok Sasaran | 2 |
| | |
| BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021 | 9 |
| 2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra | 9 |
| 2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja | 15 |
| | |
| BAB III KENDALA DAN SOLUSI | 11 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 12 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2021 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Target OutCome, Output |
|-----|---|--|--|------------------------|
| I | 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD Survei Kepuasan Internal | 74 100 |
| 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 17 Dokumen |
| 1.1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dok perencanaan | 9 Dokumen |
| 1.2 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dok Evaluasi kinerja | 7 Dokumen |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu | 14 Laporan |
| 2.1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 170 Orang |
| 2.2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran | Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran | 14 Laporan |
| 3 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang |
| 3.1 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal | 50 Orang |
| 3.2 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan | 50 Orang |
| 4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi umum PD | 6 Kegiatan |
| 4.1 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 10 jenis |
| 4.2 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor | 673 unit |
| 4.3 | | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan | 68571 lembar |
| 4.4 | | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5000 eksemplar |
| 4.5 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum rapat | 1500 pax |
| 4.6 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah | |
| 5 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | 15 Jenis |
| 5.1 | | Pengadaan Mebel | jumlah mebeleur | 10 unit |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|-------------|
| 5.2 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 unit |
| 5.3 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah | 2 unit |
| 5.4 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah | 0 unit |
| 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Jenis |
| 6.1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 4800 lembar |
| 6.2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | 12 bulan |
| 6.3 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti | 6 orang |
| 7 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | 9 Jenis |
| 7.1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 10 unit |
| 7.2 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 5 jenis |
| 7.3 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit |
| 7.4 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 1 paket |
| | | | | |
| II | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | 5% |
| | | | Rasio Irigasi | 0,5% |
| 1 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | 5% |
| 1.1 | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 4 Dokumen |

| | | | | |
|-----|--|---|--|-------------|
| 1.2 | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 5 Dokumen |
| 1.3 | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen |
| 1.4 | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | bangunan penampung air yang terbangun | 350 M' |
| 1.5 | | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang tanggul sungai yang terbangun (m) | 1370 M'eter |
| 1.6 | | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Luas bangunan polder/kolam retensi | 3 Ha |
| 1.7 | | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | panjang pengaman pantai yang dibangun | 175 m |
| 1.8 | | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai/Kali yang dilakukan pemeliharaan | 140 km |
| 1.9 | | Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | lembaga yang dibina dan diberdayakan | 1 Lembaga |
| | | | | |
| 2 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Irigasi | 0,50% |
| 2.1 | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 4 Dokumen |
| 2.2 | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | jaringan irigasi yang ditingkatkan | 336 Ha |
| 2.3 | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan | 300 Ha |
| 2.4 | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan | 400 Ha |
| 2.5 | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan | 200 Ha |
| 2.6 | | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif | 1 Lembaga |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-----------------|
| III | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | 91,50% |
| 1 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | 91,50% |
| 1.1 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan yang terencana | 251 Km |
| 1.2 | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | kondisi jalan yang disurvey | 850,99 km |
| | | | kondisi jembatan yang disurvey | 3.508 km |
| 1.3 | | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan PHNJD yang terbangun | 10 Km |
| 1.4 | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang dilebarkan | 9,5 km |
| | | | Panjang jalan yang menuju standar (PT.SMI) | 18,5 km |
| 1.5 | | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | 1,47 km |
| | | | Panjang jalan yang direhabilitasi (PT.SMI) | 4 km |
| 1.6 | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang terpelihara berkala | 14,88 km |
| 1.7 | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang fungsional jalan yang terpelihara | 752.65 km |
| 1.8 | | Penggantian Jembatan | Panjang jembatan yang diganti | 28 m |
| 1.9 | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang jembatan yang terpelihara | 3508,75 m |
| | | | | |
| IV | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi | 96,09% |
| 1 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi | 1 Penyelenggara |
| 1.1 | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi | 1 laporan |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) | 2 Kegiatan |
| | | | Jumlah tenaga ahli yang dilatih dan disertifikasi | 30 Orang |
| 2 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 1 Penyelenggara |
| 2.1 | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi | 2 layanan |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|----------------|
| V | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang | 83% |
| 1 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan | 2 Perencanaan |
| 1.1 | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan | 1 RTRW |
| 1.2 | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi | Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan | 1 RRTR |
| 1.3 | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan | 1 Sosialisasi |
| | | | | |
| 2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 15 Pertemuan |
| 2.1 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi | 21 Pelanggaran |
| 2.2 | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang | 16 Rekomendasi |
| | | | | |
| | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Persentase Pendataan awal Pengadaan Lahan | 55,56% |
| 1 | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Luas Lokasi Pengadaan tanah | 5 Ha |
| 1.1 | | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Survey Pengumpulan data awal untuk Pengadaan Lahan kewenangan Provinsi | 1 dokumen |
| | | | | |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum | 14,29% |
| 1 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi | 2 Sengketa |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|
| 1.1 | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi | Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2 Sengketa |
| 1.2 | | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi | 2 Sengketa |
| | | | | |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Berkurang Penyelesaian ganti Kerugiandan Santunan Tanah | 14,29% |
| 1 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Luas tanah yang dibebaskan | 1 Hektar |
| 1.1 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 1 lokasi |
| 1.2 | | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi | 0,5 Hektar |
| | | | | |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Terlaksananya Inventarisasi tanah | 50% |
| 1 | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Luas redistribusi tanah yang di inventarisir | 50 Hektar |
| 1.1 | | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Luas redistribusi tanah yang di inventarisir | 0,5 Hektar |
| | | | | |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Penggunaan tanah yang terencana | 100% |
| 1 | | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Review Masterplan Komplek Perkantoran | 1 Dokumen |
| 1.1 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan tanah | 1 Dokumen |
| | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | |
| 1 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| 1.1 | | Jumlah komponen instalasi listrik | Jumlah komponen | 4 jenis |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---------------|
| | | | instalasi listrik | |
| 1.2 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | 206 unit |
| 1.3 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan | 3000 lembar |
| 1.4 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 400 eksamplar |
| 1.5 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia | 500 pax |
| 1.6 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 0 kali |
| | | | | |
| 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 2.1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah materai | 297 lembar |
| 2.2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan | 12 Bulan |
| 2.3 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga keamanan/satpam, kebersihan dan supir kantor yang dipekerjakan | 10 orang |
| | | | | |
| 3 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 3.1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah bahan bakar | 3880 liter |
| | | | jumlah pembayaran stnk | 6 unit |
| | | | jumlah suku cadang kendaraan | 23 unit |
| 3.2 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 21 jenis/unit |
| 3.3 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit |
| | | | | |

- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 11 Program, 22 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja |
|----|--|--|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | 3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | 4.3 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 4.4 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | 4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 5.1 Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel |
| | 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | 5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau |

| | | | |
|------------|-----|---|---|
| | | Lapangan | Lapangan |
| | 7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | 7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | |
| II | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
| 1 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | 1.1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya |
| | 1.2 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |
| | 1.3 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi |
| | 1.4 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya |
| | 1.5 | Pembangunan Tanggul Sungai | Pembangunan Tanggul Sungai |
| | 1.6 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Pembangunan Polder/Kolam Retensi |
| | 1.7 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |
| | 1.8 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| | 1.9 | Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi |
| | | | |
| 2 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | 2.1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
| | 2.2 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | 2.3 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa |
| | 2.4 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | 2.5 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa |
| | 2.6 | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Operasional Unit Pengelola Irigasi |
| | | | |
| III | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |

| | | | |
|-----------|-----|--|--|
| 1 | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| | 1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
| | 1.2 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
| | | | |
| | 1.3 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan |
| | 1.4 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan Menuju Standar |
| | | | |
| | 1.5 | Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan |
| | | | |
| | 1.6 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| | 1.7 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan |
| | 1.8 | Penggantian Jembatan | Penggantian Jembatan |
| | 1.9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan |
| | | | |
| IV | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
| 1 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi |
| | 1.1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi |
| | | | |
| | | | |
| 2 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi |
| | 2.1 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi |
| | | | |
| V | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
| 1 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi |
| | 1.1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi |
| | 1.2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi |
| | 1.3 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang |
| | | | |
| 2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi |
| | 2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
| | 2.2 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
| | | | |
| VI | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM |

| | | | |
|-------------|-----|---|---|
| 1 | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi |
| | 1.1 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum |
| | | | |
| VII | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
| 1 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | 2.1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | 2.2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | | |
| VIII | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
| 1 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| | 1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| | 1.2 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| | | | |
| IX | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |
| 1 | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | 1.1 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah |
| | | | |
| X | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |
| 1 | | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | 1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah |
| | | | |
| XI | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| 1 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | 1.1 | Jumlah komponen instalasi listrik | Jumlah komponen instalasi listrik |
| | 1.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| | 1.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan |
| | 1.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | 1.5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | 1.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | |
| 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 2.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 2.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 2.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | |
| 3 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 3.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan |
| | | | |
| | 3.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | 3.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN I TAHUN 2021

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 11 program, 22 kegiatan, 73 sub kegiatan dalam rencana strategis dan 11 program, 22 kegiatan, 73 sub kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2021.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja
Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD induk Triwulan I Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 18.758.246.610 (4,48%) dari pagu Rp. 419.362.878.244. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan I dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fisik masih dalam proses pelaksanaan di lapangan.
2. Adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan sebagian paket pekerjaan ditunda

Saran dan tindak lanjut:

1. Untuk pekerjaan fisik yang sudah kontrak untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 18.758.246.610 (4,48%) dari pagu Rp. 419.362.878.244. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

LAMPIRAN

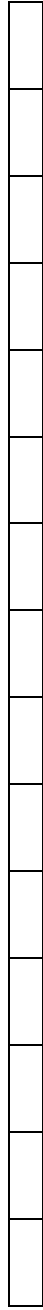
Evaluasi Hasil Renja Tahun 2021
TRIWULAN I
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

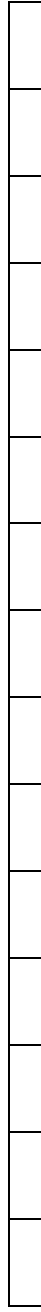
| No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2021 (%) | | SKPD Pengaju b |
|----|---------------|------------------|--|---|--------|---|---|----------------|--|---------------|---|----|--|--|---------|---|---------------|---|---|----------------|
| | | | | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | I | II | | III | IV | K | Rp | 13=12/7x100% | K | |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI | Nilai Sakip PD | 79,00 | | 78,5 | | | | | | | 0,00% | #DIV/0! | | | | | |
| | | | | Survey Kepuasan Layanan | 100,00 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36,00 | 401.480.881 | 17 | 605.940.312 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20,00 | 1.537.500.000 | 9 | 420.755.980 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.01 | 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14,00 | 401.480.881 | 7 | 185.184.332 | 3 | | | | | 42,86% | 0,00% | 3,00 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | 28,00 | 49.777.715.047 | 14 | 24.281.812.218 | | | | | | 0,00% | 17,11% | 0,00 | 4.154.604.498 | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 340,00 | 49.731.631.625 | 170 | 24.259.332.500 | 170 | 4.154.604.498 | | | | 100,00% | 17,13% | 170,00 | 4.154.604.498 | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran | 28,00 | 46.083.422 | 14 | 22.479.718 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 200,00 | 314.183.000 | 100 | 138.080.000 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100,00 | 184.500.000 | 50 | 82.455.000 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.05 | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 100,00 | 129.683.000 | 50 | 55.625.000 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12,00 | 1.397.162.307 | 6 | 575.490.569 | | | | | | 0,00% | 6,58% | 0,00 | 37.863.270 | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20,00 | 174.235.416 | 10 | 84.992.886 | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|----------|---------------|-------|---------------|-------------|---|-------------|-------|--------|------|-------------|
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bahan logistik kantor (unit) | 1346,00 | 47.867.500 | 673 | 23.350.000 | 816.000 | - | 816.000 | 0,00% | 3,49% | 0,00 | 816.000 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 05 | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (lembar) | 137142 | 118.899.391 | 68571 | 57.999.703 | 2.800.000 | - | 2.800.000 | 0,00% | 4,83% | 0,00 | 2.800.000 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar) | 10000,00 | 51.250.000 | 5000 | 25.000.000 | 1.960.000 | - | 1.960.000 | 0,00% | 7,84% | 0,00 | 1.960.000 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum rapat (pax) | 3000,00 | 126.075.000 | 1500 | 61.500.000 | 8.174.000 | - | 8.174.000 | 0,00% | 13,29% | 0,00 | 8.174.000 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah (kali) | | 878.835.000 | 0 | 322.648.000 | 24.113.270 | - | 24.113.270 | 0,00% | 7,47% | 0,00 | 24.113.270 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | 30,00 | 7.681.633.652 | 15 | 3.747.138.367 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 05 | Pengadaan Mebel | jumlah mebeleur (unit) | 20,00 | 70.838.066 | 10 | 34.555.154 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 07 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit) | 20,00 | 1.407.506.622 | 0 | 686.588.596 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah (unit) | 4,00 | 5.017.077.617 | 2 | 2.447.354.935 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah (unit) | 2,00 | 1.186.211.348 | 0 | 578.639.682 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| 1 | 03 | 01 | 1.0 | 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16,00 | 4.083.910.015 | 8 | 2.303.587.812 | - | - | 316.360.159 | 0,00% | 13,73% | 0,00 | 316.360.159 |
| 1 | 03 | 01 | 1.0 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai (lembar) | 9600 | 275.905.015 | 4800 | 134.587.812 | 24.590.000 | - | 24.590.000 | 0,00% | 18,27% | 0,00 | 24.590.000 |
| 1 | 03 | 01 | 1.0 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan (bulan) | 24,00 | 188.805.000 | 12 | 359.400.000 | 36.570.159 | - | 36.570.159 | 0,00% | 10,18% | 0,00 | 36.570.159 |
| 1 | 03 | 01 | 1.0 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kebersihan/prambakti (orang) | 12,00 | 3.619.200.000 | 6 | 1.809.600.000 | 255.200.000 | - | 255.200.000 | 0,00% | 14,10% | 0,00 | 255.200.000 |
| 1 | 03 | 1 | 1.0 | 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis BMD yang dipelihara | 18,00 | 2.008.771.573 | 9 | 979.888.572 | - | - | 21.790.936 | 0,00% | 2,22% | 0,00 | 21.790.936 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|--|-------|----------------|----------------|-------------------------------|------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------------|------|---|---------------|---------------|--|--|
| 1 | 03 | 1 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit) | 20,00 | 774.674.500 | 10 | 377.890.000 | 21.790.936 | - | 21.790.936 | 0,00% | 5,77% | 0,00 | 21.790.936 | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis) | 10,00 | 256.249.861 | 5 | 124.999.932 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) | 2,00 | 922.498.565 | 1 | 449.999.300 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| 1 | 03 | 1 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (paket) | 2,00 | 55.348.647 | 1 | 26.999.340 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32.631.937.870 | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | 0,00% | 13,88% | | |
| | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) | 10,00 | | 5,00 | | | | | | | 0,00% | #DIV/0! | 0,00 | - | | | | |
| | | | | | | Persentase Penyediaan Air Baku | 2,40 | | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rasio Irigasi (%) | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1.01 | | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) | 10,00 | 55.524.475.500 | 5,00 | 26.742.894.420 | | | 140.821.000 | 0,00% | 0,53% | 0,00 | 140.821.000 | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1.01 | 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan | 8 | 937.321.500 | 4,00 | 513.898.674 | | | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1.01 | 3 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama | 8 | 1.588.196.500 | 5,00 | 862.506.934 | | | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1.01 | 4 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi (dokumen) | 2 | 1.695.473.000 | 1,00 | 791.285.362 | | | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1.01 | 6 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | bangunan penampung air yang terbangun (M) | 700 | 7.853.749.675 | 350,00 | 3.799.265.788 | | | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|----|---|--|------|---------------|-------|---------------|------------|---|-------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 03 | 11 | 1.0 1 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli yang dilatih dan disertifikasi (ORANG) | 60 | 592.726.750 | 30,00 | 265.284.935 | 11.600.000 | - | 11.600.000 | 0,00% | 4,37% | 0,00 | 11.600.000 |
| 1 | 03 | 11 | 1.0 2 | | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi | 2,00 | 227.242.500 | 1,00 | 87.099.986 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | |
| 1 | 03 | 11 | 1.0 2 | 05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi (Bantuan) | 4 | 227.242.500 | 2,00 | 87.099.986 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | | | 352.384.921 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 3,29% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%) | 100 | 3.239.000.000 | 83,00 | 1.377.049.484 | - | - | 17.998.000 | 0 | 1,31% | 0,00 | 17.998.000 |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 1 | | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi | Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan | 4 | 1.947.500.000 | 2,00 | 686.052.389 | - | - | 598.000 | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 1 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan (RTRW) | 2 | 1.742.500.000 | 1 | 586.053.833 | 598.000 | - | 598.000 | 0,00% | 0,10% | 0,00 | 598.000 |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 1 | 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi | Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan (RRTR) | 2 | 102.500.000 | 1 | 49.998.845 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 1 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan (Sosialisasi) | 2 | 102.500.000 | 1 | 49.999.711 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 4 | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 30 | 1.291.500.000 | 15 | 690.997.095 | - | - | 17.400.000 | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 4 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi (Pelanggaran) | 20 | 563.750.000 | 21 | 235.999.817 | 5.800.000 | - | 5.800.000 | 0,00% | 2,46% | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.0 4 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang (Rekomendasi) | 32 | 727.750.000 | 16 | 454.997.278 | 11.600.000 | - | 11.600.000 | 0,00% | 2,55% | 0,00 | 11.600.000 |
| | | | | | | | | | | 1.377.049.484 | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | 0,00% | 1,31% | |
| | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |







| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

32631.937.870 - 4.530.618.863,00

74498717.072 0 164.021.000.00

352.384.921 0 11600000

1.377.049.484 - 17.998.000.00

16985237 - -

37670069 - -

156.594.416 - -

33.247.437 - -

255.533.562 - -

776.055.400 - 79.927.298,00

4,43241E+11 0 18.758.246.610